

	News Title : Bappebti Dorong Pengembangan Bursa CPO	
	Media Name : bisnistoday.co.id	Journalist : Tito
	Publish Date : 13 January 2024	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 1,500,000
	Resources : Kasan (Plt Kepala Bappebti)	Ads Value : 500,000
	Section/Rubrication : Bursa	Topic : Bursa CPO

Bappebti Dorong Pengembangan Bursa CPO

TITO - SABTU, 13 JANUARI 2024, 07:38 WIB



JAKARTA, Bisnistoday – Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memperkuat perdagangan komoditi CPO (Crude Palm Oil). Bursa CPO bertujuan untuk menghadirkan harga CPO yang transparan, kredibel, dan real time sehingga Indonesia memiliki harga acuan sendiri dan tidak bergantung pada bursa Malaysia dan Rotterdam.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kasan, Plt Kepala Bappebti saat Pernyataan saat membuka Outlook Perdagangan Berjangka Komoditi dan Rapat Kerja Bappebti 2024 di Bandung, Jawa Barat, kemarin. Acara dihadiri anggota Badan Supervisi OJK Didid Noordiatmoko, Self Regulatory Organization (SRO) di industri PBK, Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK), asosiasi terkait, serta bank mitra Bappebti.



Dalam penguatan komoditas strategis Indonesia, Kasan melanjutkan, Kemendag membentuk Bursa Berjangka Crude Palm Oil (CPO) Indonesia pada 13 Oktober 2023 untuk pasar lokal dan bersifat sukarela. Harga acuan CPO tersebut dapat mendorong penentuan Harga Patokan Ekspor (HPE) dan peningkatan penerimaan negara dari pajak.

Selain itu, menurut Kasan, harga acuan CPO berkontribusi pada perbaikan harga tandan buah segar (TBS) yang diatur Kementerian Pertanian dan harga acuan biodiesel oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral lebih akurat.

Kasan mengutarakan, sejak Bursa CPO Indonesia terbentuk, berbagai upaya dilakukan Bursa dan Bappebti bersama Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia dan asosiasi melalui sosialisasi, pendekatan kepada pelaku usaha, dan pelatihan teknis. Selama 2023, tercatat 34 perusahaan CPO mendaftar sebagai anggota Bursa. Transaksi CPO Futures (CPOTR) juga didorong untuk mendukung likuiditas transaksi dan nilai transaksinya mencapai 1.822 lot (9.110 metrik ton) pada 2023.

Pengembangan Perdagangan

Kasan juga mengatakan, dalam mendorong transaksi CPO, Bappebti telah memperluas pelabuhan serah terima CPO fisik menjadi 19 pelabuhan melalui Peraturan Tata Tertib (PTT) Bursa. Pelabuhan tersebut adalah Meulaboh, Teluk Bayur, Pulau Baai, Panjang, Talang Duku, Boom Baru, Kijing, Bumiharjo, Bagendang, Trisakti, Semayang, Maloy, Mamuju, Manokwari, Bintuni, Jayapura, dan Merauke, selain Dumai dan Belawan.

“Sebagai langkah konkret pada 2024, Bappebti mendorong peningkatan likuiditas transaksi CPO di bursa. Saya meminta kepada ekosistem bursa CPO yang diberi mandat untuk menjalankan bursa CPO fisik dan futures dengan baik melalui layanan yang lebih optimal. Bursa juga harus independen, adil, dan berintegritas. Selain itu, kepada seluruh pelaku usaha CPO, baik yang besar maupun pabrik kelapa sawit untuk memajukan transaksi di bursa CPO Indonesia,” ujar Kasan.

Kasan menambahkan, langkah strategis lain Bappebti pada 2024 yaitu meningkatkan pelatihan/sosialisasi kepada pelaku usaha dan mendorong pelaku usaha CPO lokal untuk bertransaksi. Selanjutnya, mendorong transaksi CPO orientasi ekspor dan menguatkan kolaborasi Bappebti dengan bursa, unit dan kementerian terkait, serta asosiasi (termasuk mendorong pemberian insentif).

Potensi Harga Komoditas

Menurut Kasan, komoditas strategis lain yang didorong dalam PBK adalah timah murni (batangan) dan emas digital. Selain itu, perlu juga dioptimalkan transaksi multilateral, antara lain olein, emas, kopi, dan kakao. Adapun nilai transaksi PBK multilateral secara notional value (NV) pada periode Januari–November 2023 mencapai Rp379,59 triliun. Adapun transaksi Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) secara NV tercatat Rp23.048,79 triliun.

Transaksi multilateral akan menjadi fokus Bappebti ke depan karena dapat menjadi basis harga dari komoditi. Hal ini sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 32/1997 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 10/2011 tentang PBK.

Hadir sebagai narasumber, dalam rangkaian kegiatan Outlook, yakni Kepala Biro Perencanaan Kemendag Nur Rakhman, Kepala Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik Kemendag RR Dyah Palupi, akademisi Universitas Prasetya Mulia, Ketua Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (ASPEBTINDO) Udi Margo Utomo, dan Direktur Utama Bursa Berjangka Jakarta Stephanus Paulus L//